

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI

NOMOR : 107 TAHUN 1997

**T
E
M
A
N
G**

SK PENEGERIAN MTsN MANTINGAN



32.0 f

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997..

M E M U T U S K A N

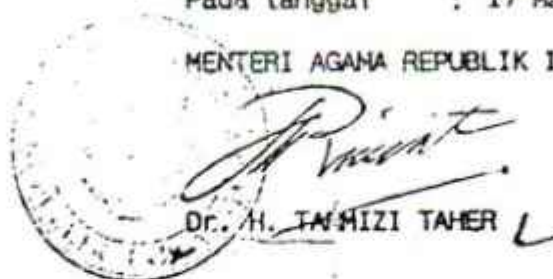
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
 - Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
 - Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
 - Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
 - Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



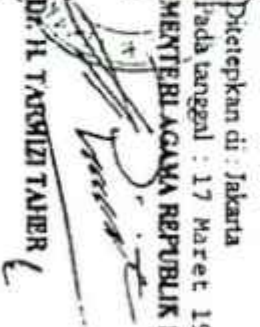
Dr. H. TAHMIZI TAHER

Tembusan :

1. Manko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No	Provinsi	No	Materi	Nama Madrasah	Pemerintah (Materi)	Kab./Kota	M.T.
73		5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bereng	Kab. Jombang Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso P. 1 Filial di Bereng Jl. Dr. Sutomo No. 44 Ds. Bereng Kec. Bereng Kab. Jombang	Kab. Jombang		
74		6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Megaluh	Kab. Jombang Madrasah Tsanawiyah Negeri Demanjar Filial di Megaluh Jombang Ds. Megaluh Kec. Megaluh Kab. Jombang	Kab. Jombang		
75		7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Perak	Kab. Jombang Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial di Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang	Kab. Jombang		
76		8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojoagung	Kab. Jombang Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Rejoso di Mancian, Jl. Syaid Sulaiman No 200 Ds. Rejo Slamet Mancian, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang	Kab. Jombang		
77		9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulurejo	Kab. Jombang Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial di Ds. Bulurejo, Kec. Diwek Kab. Jombang	Kab. Jombang		
78		10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangmojo	Kab. Magetan Madrasah Tsanawiyah Negeri Temboro Filial di Klagen Ds. Klagen Kec. Karangmojo Kab. Magetan	Kab. Magetan		
79		11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Menteran	Kab. Ngawi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedungrejar Filial di Kedungrejar Ds. Kedungrejar Kec. Menteran Kab. Ngawi	Kab. Ngawi		
80		12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gentong	Kab. Ngawi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngawi Filial di Ds. Gentong Lor No. 28 Rt. 05/02 Kel. Gentong Kec. Percut Kab. Ngawi	Kab. Ngawi		
81		13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tempuran	Kab. Lumajang Madrasah Tsanawiyah Negeri Lumajang Filial di Tempuran Jl. Masjid No. 5 Ds. Tempuran Kec. Tempuran Kab. Lumajang	Kab. Lumajang		
82		14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Turmpung	Kab. Malang Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang II Filial di Pandansongklor Jl. Raya Pandansongklor Ds. Pandansongklor Kec. Turmpung Kab. Malang	Kab. Malang		

	38	13	Madrasah Aliyah Negeri Kauruan	Madrasah Aliyah Negeri Filial di Kauruan	Kab. Tondong Tengah	
11 Kalimantan Selatan	39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pantai Harubawang, Jl. Puspita Nyanta Desa Pantai Harubawang Timur Kec. Labuh- an Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
12 Kalimantan Barat	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri I Pontanok Filial Singkawang Kab. Sambas	Kab. Sambas	
13 Sulawesi Selatan	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Ulu	Madrasah Aliyah Negeri Tanete Filial di Sungai Ulu, Mandarin No 2 Kel. Dalangur Kec. Sungai Ulu, Kab. Sungai	Kab. Sungai	
14 Maluku	42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sungai Kec. Sungai Timur, Kab. Sungai	Kab. Sungai	
	43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Galela	Kep. Maluku Utara	
	44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	


 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 17 Maret 1997
 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 H. TAMSI TAHER



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN k

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASA
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 83 (DELAPAN PULUH TIGA)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Timur	MAN Ponorogo	MAN 1 Ponorogo
2	Jawa Timur	MAN Ponorogo II	MAN 2 Ponorogo
3	Jawa Timur	MAN Trenggalek	MAN 1 Trenggalek
4	Jawa Timur	MAN Panggul	MAN 2 Trenggalek
5	Jawa Timur	MAN Tulungagung	MAN 1 Tulungagung
6	Jawa Timur	MAN Tulungagung II	MAN 2 Tulungagung
7	Jawa Timur	MAN Rejotangan	MAN 3 Tulungagung
8	Jawa Timur	MAN Situbondo	MAN 1 Situbondo
9	Jawa Timur	MAN 2 Situbondo	MAN 2 Situbondo
10	Jawa Timur	MAN Karanganyar Paiton	MAN 1 Probolinggo
11	Jawa Timur	MAN Pajarakan	MAN 2 Probolinggo
12	Jawa Timur	MAN Bangil	MAN 1 Pasuruan
13	Jawa Timur	MAN Kraton	MAN 2 Pasuruan
14	Jawa Timur	MAN Mojosari	MAN 1 Mojokerto
15	Jawa Timur	MAN Mojokerto	MAN 2 Mojokerto
16	Jawa Timur	MAN Jombang	MAN 1 Jombang
17	Jawa Timur	MAN Rejoso Peterongan	MAN 2 Jombang
18	Jawa Timur	MAN Tambak Beras	MAN 3 Jombang
19	Jawa Timur	MAN Denanyar	MAN 4 Jombang
20	Jawa Timur	MAN Genuk Watu	MAN 5 Jombang
21	Jawa Timur	MAN Kebonsari	MAN 6 Jombang
22	Jawa Timur	MAN Keboan	MAN 7 Jombang
23	Jawa Timur	MAN 5 Jombang	MAN 8 Jombang
24	Jawa Timur	MAN 6 Jombang	MAN 9 Jombang

62	Jawa Timur	MTsN Ngrembang Ngoro	MTsN 17 Jombang
63	Jawa Timur	MTsN Nglawak Kertosono	MTsN 1 Nganjuk
64	Jawa Timur	MTsN Tanjung Anom	MTsN 2 Nganjuk
65	Jawa Timur	MTsN Tanjuntani Prambon	MTsN 3 Nganjuk
66	Jawa Timur	MTsN Termas Baron	MTsN 4 Nganjuk
67	Jawa Timur	MTsN Nganjuk	MTsN 5 Nganjuk
68	Jawa Timur	MTsN Ngronggot	MTsN 6 Nganjuk
69	Jawa Timur	MTsN Berbek	MTsN 7 Nganjuk
70	Jawa Timur	MTsN Lengkong	MTsN 8 Nganjuk
71	Jawa Timur	MTsN Juwet	MTsN 9 Nganjuk
72	Jawa Timur	MTsN Bagor	MTsN 10 Nganjuk
73	Jawa Timur	MTsN Temboro	MTsN 1 Magetan
74	Jawa Timur	MTsN Karangmojo 1	MTsN 2 Magetan
75	Jawa Timur	MTsN Takeran 1	MTsN 3 Magetan
76	Jawa Timur	MTsN Gorang Gareng	MTsN 4 Magetan
77	Jawa Timur	MTsN Panekan	MTsN 5 Magetan
78	Jawa Timur	MTsN Klagen Karangmojo 2	MTsN 6 Magetan
79	Jawa Timur	MTsN Kiringan	MTsN 7 Magetan
80	Jawa Timur	MTsN Lembeyan	MTsN 8 Magetan
81	Jawa Timur	MTsN Bendo	MTsN 9 Magetan
82	Jawa Timur	MTsN Sidorejo	MTsN 10 Magetan
83	Jawa Timur	MTsN Geneng	MTsN 1 Ngawi
84	Jawa Timur	MTsN Babadan	MTsN 2 Ngawi
85	Jawa Timur	MTsN Ngawi	MTsN 3 Ngawi
86	Jawa Timur	MTsN 2 Paron	MTsN 4 Ngawi
87	Jawa Timur	MTsN Paron Ngawi	MTsN 5 Ngawi
88	Jawa Timur	MTsN Kedung Galar	MTsN 6 Ngawi
89	Jawa Timur	MTsN Ketanggung	MTsN 7 Ngawi
90	Jawa Timur	MTsN Ngrambe	MTsN 8 Ngawi
91	Jawa Timur	MTsN Jogorogo	MTsN 9 Ngawi
92	Jawa Timur	MTsN Mantingan	MTsN 10 Ngawi
93	Jawa Timur	MTsN Bojonegoro	MTsN 1 Bojonegoro
94	Jawa Timur	MTsN Bojonegoro 2	MTsN 2 Bojonegoro
95	Jawa Timur	MTsN Kepoh Baru	MTsN 3 Bojonegoro
96	Jawa Timur	MTsN Ngraho	MTsN 4 Bojonegoro
97	Jawa Timur	MTsN Balen	MTsN 5 Bojonegoro
98	Jawa Timur	MTsN Tuban	MTsN 1 Tuban

172	Jawa Timur	MTsN Malang III	MTsN 1 Malang
173	Jawa Timur	MTsN Turen	MTsN 2 Malang
174	Jawa Timur	MTsN Lawang	MTsN 3 Malang
175	Jawa Timur	MTsN Harjokuncaran	MTsN 4 Malang
176	Jawa Timur	MTsN Donomulyo	MTsN 5 Malang
177	Jawa Timur	MTsN Kepanjen	MTsN 6 Malang
178	Jawa Timur	MTsN Tumpang	MTsN 7 Malang
179	Jawa Timur	MTsN Blitar	MTsN 1 Kota Blitar
180	Jawa Timur	MTsN Kepanjen Kidul	MTsN 2 Kota Blitar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &